

TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

Taufik Kurrohman¹

Abstract

This research analysis the Madiun City's financial reporting 2009. The author evaluate the development financial ability in Madiun City. The research object of this study is Madiun City's Financial Report. The analysis development financial ability region is measured by budget and realize ratio. Finally, the result show that the realization of indirect expenditure in Madiun City is to low, the effects is some of people needed can't be fullfil bby local government.

Keywords: financial reporting, budgeting, realization.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena pembangunan daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah mengenai pemberian kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Tujuan pemberian pengelolaan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab

¹ Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Jember

lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah. Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Wulandari, 2001:17) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi suatu daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban daerah dalam pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra-sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. kemampuan keuangan daerah ini merupakan salah satu kriteria utama dalam menilai kemandirian suatu daerah. Namun dalam penganggaran dan pelaksanaannya seringkali pemerintah daerah kurang serius menggarapnya. Hal ini menyebabkan beberapa kelemahan dalam realisasi anggarannya. Hal ini juga terjadi di Kota Madiun.

Rumusan Masalah

Bagaimana realisasi penganggaran dari laporan keuangan Kota Madiun tahun 2009?

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota

didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas ; yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata; Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab; Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari metode kualitatif tersebut bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2008) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Filsafat postpositifme memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/ utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang sumber datanya berasal dari laporan pertanggungjawaban Walikota Madiun tahun 2009. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode deskriptis analitis bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti.

Nawawi dan Pratomo (1999) dalam Prihatiningrum (2009) menyatakan bahwa metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai adanya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan adalah studi literature atau riset kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berupa buku-buku, dokumen pribadi, catatan lapangan, penelitian terdahulu, pendapat para ahli atau opini dan teori mengenai masalah yang diangkat.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif yang dimulai dari pengumpulan data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan Kota Madiun tahun 2009 yang diperoleh baik dari jurnal maupun artikel yang selanjutnya akan ditelaah dengan metode kualitatif dengan penggabungan metode studi tentang literatur yang ada. Selanjutnya penelitian yang ada dikembangkan dan dianalisis dengan didasarkan laporan pertanggungjawaban Kota Madiun tahun 2009 sehingga memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

Temuan

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH :

Pendapatan daerah Kota Madiun tahun anggaran 2009 dapat ter realisasi 111,9 % dari target yang direncanakan dalam APBD perubahan 2009 (Proyeksi pendapatan daerah di target Rp. 372,422,039,000,- dapat ter-realisasi sebesar Rp. 416,601,459,386,-) sedangkan belanja daerah ter realisasi 90,4 % (Proyeksi Belanja daerah di alokasikan Rp. 430,848,376,000.00,- ter-realisasi sebesar Rp. 389,629,298,051.02 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	STLH PERUBAHAN	REALISASI	%	SELISIH
Pendapatan	372,422,039,000	416,601,459,386	111,9 %	44,179,420,386
Belanja	430,848,376,000.00	389,629,298,051.02	90,4 %	(41,219,077,949)
Surplus/Defisit	(58,426,337,000.00)	26,972,161,334.95		

Realisasi Pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp. 44,179,420,386,- sementara realiasi belanja kurang dari target sebesar Rp. (41,219,077,949),- sehingga terjadi pergeseran surplus dan defisit anggaran, APBD tahun 2009 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp. **(58,426,337,000.00)**,-pada kenyataannya (Realisasinya) justru surplus sebesar Rp. **26,972,161,334.95**

RINGKASAN REALISASI APBD 2009

URAIAN	TAHUN 2009 (LPJ)			
	PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH	%
PENDAPATAN	372,422,039,000	416,601,459,386	44,179,420,386	111.9%
PAD	25,402,795,000	43,880,880,253	18,478,085,253	172.7%
Pajak daerah	8,195,451,000	9,427,601,807	1,232,150,807	115.0%
Retribusi daerah	11,880,576,000	13,653,458,797	1,772,882,797	114.9%
Hasil pengelolaan kekada	2,125,268,000	2,343,819,200	218,551,200	110.3%
Lain - lain PAD yg sah	3,201,500,000	18,456,000,449	15,254,500,449	576.5%
DANA PERIMBANGAN	325,883,166,000	334,527,412,777	8,644,246,777	102.7%

TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

Bagi hasil pajak/bukan pajak	22,747,526,000	31,396,432,777	8,648,906,777	138.0%
Dana alokasi umum	272,310,640,000	272,305,980,000	(4,660,000)	100.0%
Dana alokasi khusus	30,825,000,000	30,825,000,000	-	100.0%
LAIN2 PENDAPATAN YG SAH	21,136,078,000	38,193,166,356	17,057,088,356	180.7%
Pendapatan hibah	-	98,300,000	98,300,000	
Dana darurat	-		-	
Dana bagi hasil pajak dr prov.	15,550,000,000	24,242,971,757	8,692,971,757	155.9%
Dana penyesuaian & otsus	4,918,193,000	12,975,663,000	8,057,470,000	263.8%
Bant keu.dr prov. atau pemda l	667,885,000	876,231,599	208,346,599	131.2%
			-	
BELANJA	430,848,376,000.00	389,629,298,051.02	(41,219,077,949)	90.4%
BELANJA TDK LANGSUNG	253,152,813,000.00	237,670,127,250.00	(15,482,685,750)	93.9%
Belanja pegawai	234,512,406,000.00	227,831,860,250.00	(6,680,545,750)	97.2%
Belanja bunga			-	
Belanja hibah	2,391,000,000.00	2,415,117,000.00	24,117,000	101.0%
Belanja bantuan sosial	8,297,651,000.00	7,423,150,000.00	(874,501,000)	89.5%
Bagi hasil kepada pemdes			-	
Ban Keu. kpd pemdes			-	
Belanja tidak terduga	7,951,756,000.00		(7,951,756,000)	0.0%
BELANJA LANGSUNG	177,695,563,000.00	151,959,170,801.02	(25,736,392,199)	85.5%
Belanja pegawai	19,433,153,000.00	16,895,199,430.00	(2,537,953,570)	86.9%
Belanja barang & jasa	69,293,443,000.00	60,727,411,570.00	(8,566,031,430)	87.6%
Belanja modal	88,968,967,000.00	74,336,559,801.02	(14,632,407,199)	83.6%
			-	
Surplus / (Devisit)	(58,426,337,000.00)	26,972,161,334.95	85,398,498,335	-46.2%
PEMBIAYAAN			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58,426,337,000.00	58,484,025,748.93	58,425,599,412	
Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	58,426,337,000.00	58,426,337,748.93	58,367,911,412	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		57,688,000.00	57,688,000	
Jumlah penerimaan	58,426,337,000.00	58,484,025,748.93	58,425,599,412	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			-	
Penyertaan modal			-	

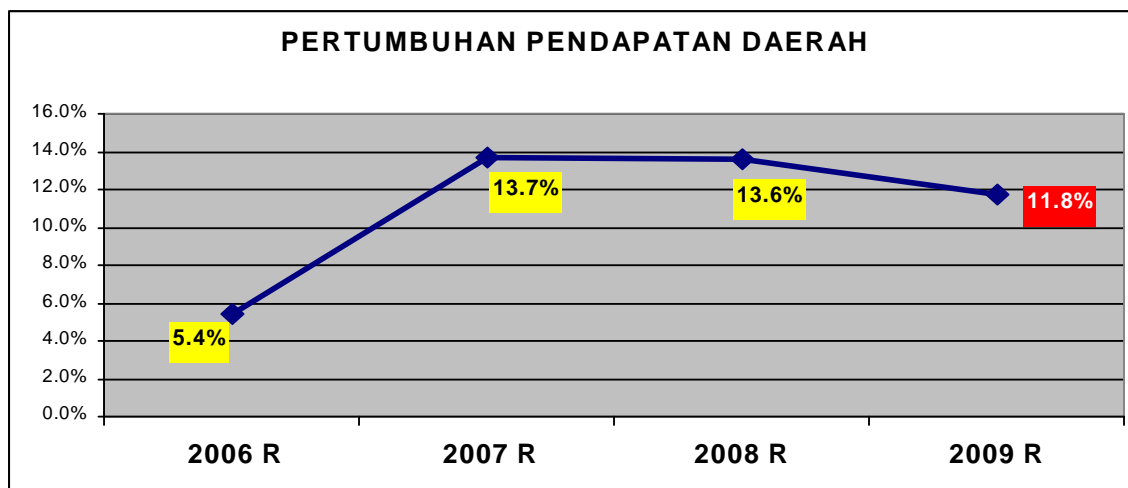
TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

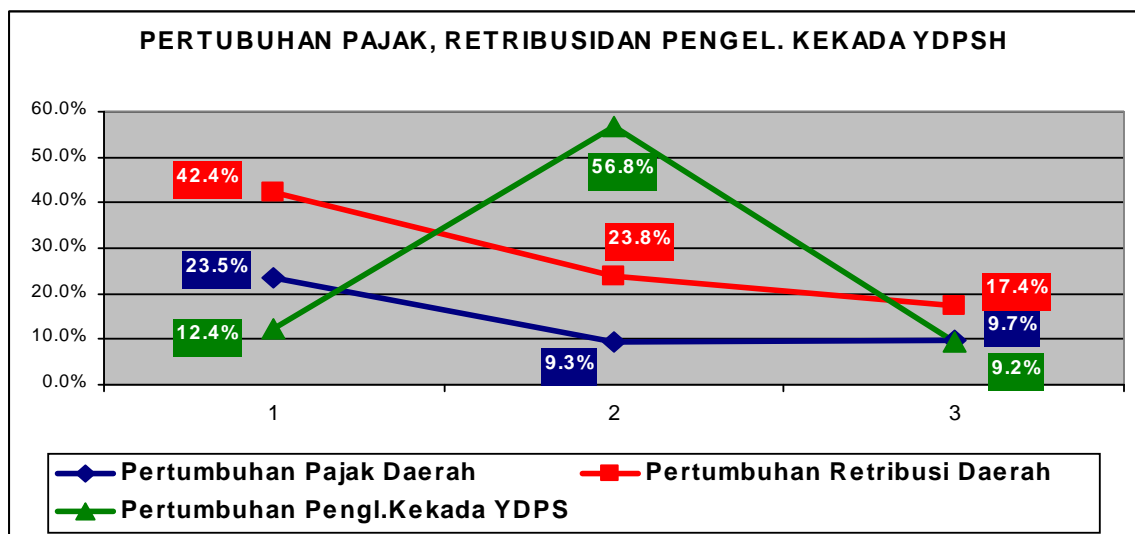
(investasi) pemerintah				
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
Jumlah pengeluaran	-		-	
Pembiayaan netto	58,426,337.00	58,484,025,748.93	58,425,599,412	
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)		85,456,187,083.88	85,456,187,084	

- Surplus APBD tahun 2009 tersebut disebabkan oleh karena mening katnya (terlampainya) pendapatan daerah dari target yang direncanakan (pendapatan daerah terlampaui 111,9 % dari target), pelampauan tersebut sebagian besar bersumber dari :

1. PAD realisasinya meningkat Rp. 18,478,085,253,- dari proyeksi awal (kenaikan ini sebagian besar berasal dari Klaim asuransi pasar besar Rp. 10.327.500.000,- Pengembalian hibah pemilukada Rp 1.837.687.569,- Pengembalian jamkesmada Rp. 2.332.627057,-)
2. Dana Perimbangan meningkat Rp. 8,644,246,777,-(kenaikan ini sebagian besar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari bagi hasil cukai dan tunjangan guru PNS daerah)
3. Lain-Lain PAD yang sah meningkat Rp. 17,057,088,356,- (kenaikan ini sebagian besar dari propinsi jatim berupa dana bagi hasil pajak propisi (pajak kendaraan bermotor /PKB, BBNKB dll) dan bantuan keuangan.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelampauan pendapatan daerah pada realisasi 2009 atas target pada APBD lebih banyak disebabkan oleh faktor external dari pada faktor internal (kinerja Pemerintah Daerah) hal ini setidaknya di dukung oleh data bahwa Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2009 turun sedikit dibanding tahun 2008 dan Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pertumbuhannya wajar dan sesuai potensinya, bahkan retribusi dan Pengelolaan kekada yang dipisahkan pertumbuhannya menurun. seperti yang ditunjukkan oleh grafik dibawah ini





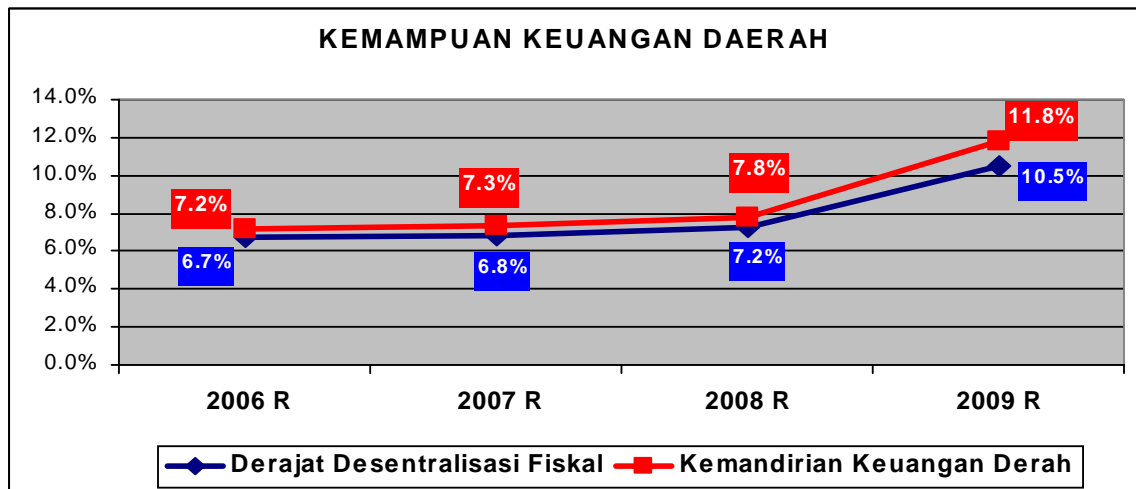
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Diberlakukannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan pada Kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Setiap daerah diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah sebagai wujud suksesnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

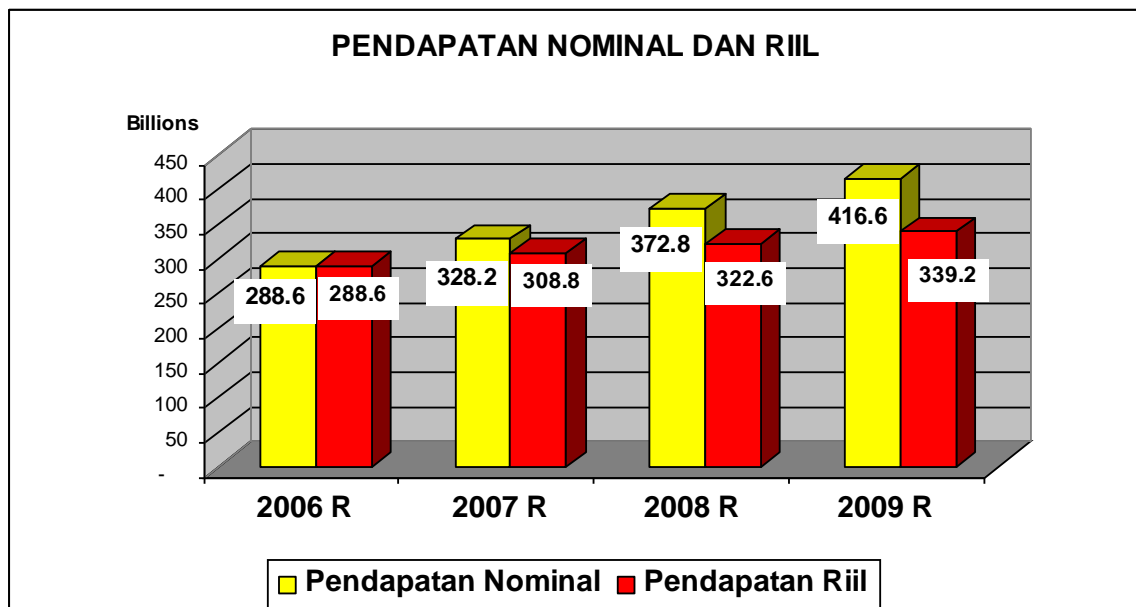
Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dapat diukur dari perkembangan kemampuan keuangan daerah apakah sebuah Kabupaten/Kota semakin mandiri atau semakin tergantung kepada pemerintah pusat, salah satu indikatornya adalah derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah, dari dokumen LPJ APBD Kota Madiun tahun 2009 dan data-data pendukung lainnya dapat dianalisis bahwa perkembangan kemampuan keuangan daerah Kota Madiun menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ketahun seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

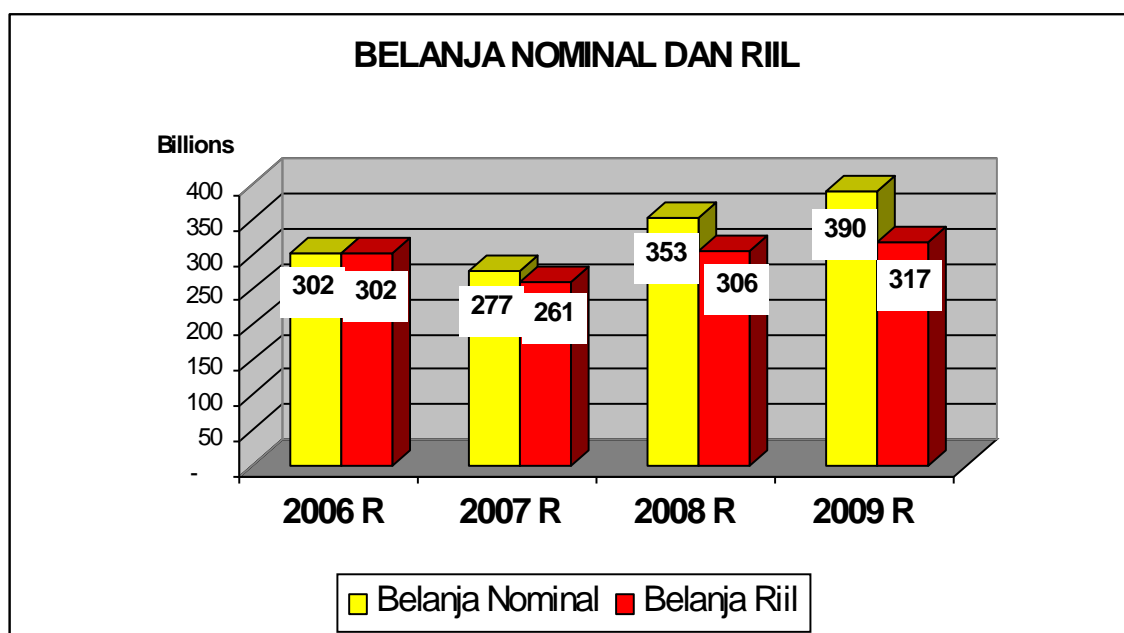


Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dari tahun ketahun Kota Madiun adalah merupakan capaian yang positif, akan tetapi jika dicermati lebih mendalam bahwa peningkatan Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi pada tahun 2009 lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal (Klaim asuransi pasar besar, Pengembalian hibah pemilukada dan Pengembalian jamkesmada) dari pada faktor internal (peningkatan kinerja pemerintah daerah)

Pendapatan daerah trennya naik terus selama 4 tahun terakhir, namun dengan tingkat inflasi di Kota Madiun rata-rata 3 tahun terakhir (2007-2008-2009) sebesar 7 % pertahun maka pendapatan riil jika dihitung dari tahun awal 2006 maka menunjukkan tren yang mendekati stagnan setelah tahun 2007, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini



Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun sejak tahun 2007 cenderung stagnan, tren stagnannya kinerja pendapatan daerah tentu sangat berpengaruh pada kapasitas belanja daerah, dari grafik dibawah ini menunjukkan bahwa tren belanja riil kota madiun selama 4 tahun terakhir nampak stagnan pada nilai riil sekitar Tiga ratusan Milliar Rupiah, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini



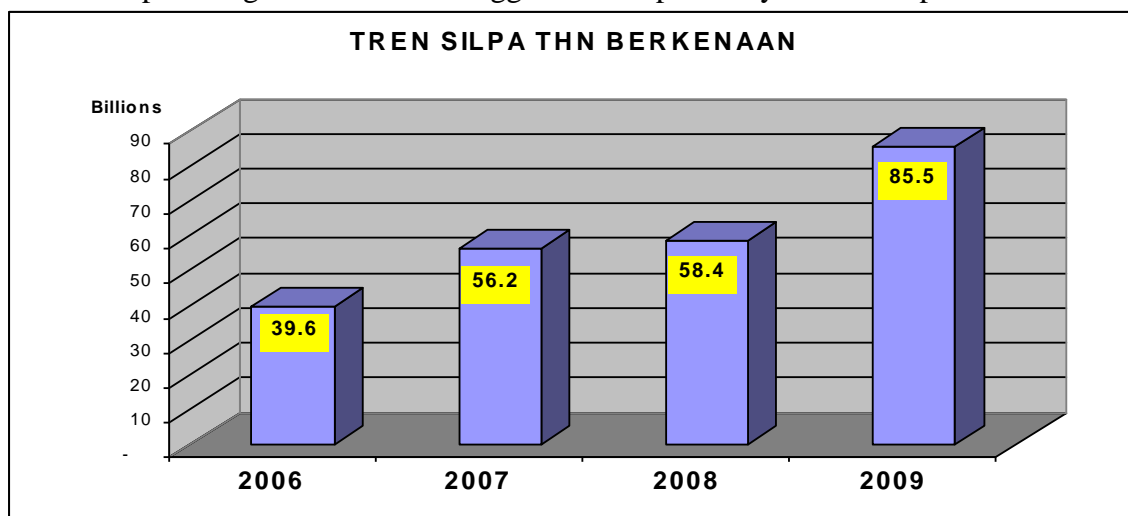
**TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH
RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH**

URAIAN	TAHUN 2009 (LPJ)			
	PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH	%
BELANJA	430,848,376,000.00	389,629,298,051.02	(41,219,077,949)	90.4%
BELANJA TDK LANGSUNG	253,152,813,000.00	237,670,127,250.00	(15,482,685,750)	93.9%
Belanja pegawai	234,512,406,000.00	227,831,860,250.00	(6,680,545,750)	97.2%
Belanja bunga			-	
Belanja hibah	2,391,000,000.00	2,415,117,000.00	24,117,000	101.0%
Belanja bantuan sosial	8,297,651,000.00	7,423,150,000.00	(874,501,000)	89.5%
Bagi hasil kepada pemdes			-	
Ban Keu. kpd pemdes			-	
Belanja tidak terduga	7,951,756,000.00		(7,951,756,000)	0.0%
BELANJA LANGSUNG	177,695,563,000.00	151,959,170,801.02	(25,736,392,199)	85.5%
Belanja pegawai	19,433,153,000.00	16,895,199,430.00	(2,537,953,570)	86.9%
Belanja barang & jasa	69,293,443,000.00	60,727,411,570.00	(8,566,031,430)	87.6%
Belanja modal	88,968,967,000.00	74,336,559,801.02	(14,632,407,199)	83.6%
			-	

Tingkat Realisasi belanja daerah pada tahun 2009 sebesar 90,4 % dari proyeksi alokasi (Proyeksi Belanja daerah di alokasikan Rp. 430,848,376,000.00 terrealisasi sebesar Rp. 389,629,298,051.02,-) sehingga terdapat sisa lebih belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 41,219,077,949,- sisa yang besar tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Madiun belum dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya daerah untuk pembangunan.

Sisa dana belanja yang tidak terserap sebagian besar (62,4 % dari total dana yang tidak terserap) dari sisa lebih kelompok belanja langsung yaitu sebesar Rp. 25,736,392,199,- padahal kelompok belanja langsung adalah belanja yang

dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah, untuk itu diperlukan penjelasan Mengapa Belanja Langsung realisasinya rendah? Karena rendahnya realisasi belanja langsung menunjukkan turunnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga masalah masalah pembangunan yang seharusnya dapat terselesaikan tahun 2009 menjadi tertunda penyelesaiannya. Rendahnya serapan dana juga berimplikasi pada tidak maksimalnya pemanfaatan Silpa pada tahun lalu untuk akselerasi pembangunan daerah sehingga besar Silpa trennya naik setiap tahun.



KINERJA ANGGARAN 9 SKPD

Secara umum bisa diungkapkan bahwa dari sekian dinas atau instansi penyelenggara urusan pemerintahan daerah, terdapat 9 SKPD yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran kategori rendah sampai akhir tahun anggaran 2009. (*rincian terlampir*). SKPD tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 2.1
9 SKPD Kota Madiun Dengan Tingkat Realisasi Anggaran Terendah

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	Sisa	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	44,636,739,000	32,036,518,532	12,600,220,468	71.8%
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,397,855,000	4,606,907,109	1,790,947,891	72.0%
3	SEKRETARIAT DPRD	7,089,146,000	5,310,957,048	1,778,188,952	74.9%
4	SEKRETARIAT DAERAH	56,431,307,000	43,201,632,626	13,229,674,374	76.6%
5	DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN	13,267,318,000	11,370,513,281	1,896,804,719	85.7%
6	BAPPEDA	4,799,094,000	4,243,569,178	555,524,822	88.4%
7	BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN	5,793,607,000	5,141,600,570	652,006,430	88.7%
8	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2,957,023,000	2,690,710,241	266,312,759	91.0%
9	KANTOR SATUAN POLISI PP	2,412,601,000	2,177,637,179	234,963,821	90.3%
	TOTAL	143,784,690,000	110,780,045,764	33,004,644,236	77%

Sebagaimana terungkap pada Tabel 2.1 di atas, 10 SKPD tersebut dipandang memiliki kinerja anggaran dengan tingkat realisasi belanja rendah akibat tingkat realisasinya di bawah atau hampir sama dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2009 sebesar 90,43%. Melihat performa realisasi anggaran dari 10 SKPD tersebut, maka bisa dicatat:

1. Pada tahun anggaran 2009, terdapat sisa lebih belanja sebesar Rp. 41,2 Miliar, dimana dari total anggaran sisa lebih belanja tersebut; lebih dari 80% dihasilkan dari rendahnya realisasi anggaran di 9 SKPD pada Tabel 2.1 di atas yang mencapai Rp. 33 Miliar.
2. Sebagian besar dari sisa lebih belanja tahun 2009, berasal dari sejumlah SKPD “strategis” pelaksana **urusan wajib** pemerintahan daerah yang *notabene* mendapatkan alokasi anggaran relatif lebih besar dari SKPD pelaksana **urusan pilihan**. Hal ini bisa mengarah pada kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitas pelayanan publik pemerintah Kota Madiun pada tahun 2009.

Belanja Tidak Langsung

Pada komponen Belanja Tidak Langsung, dari 9 SKPD yang diteliti, terdapat Rp. 10,3 Miliar yang tidak terbelanjakan. Sebagaimana terinci pada table 2.2 berikut ini.

Table 2.2
Tingkat Realisasi Belanja Tidak Langsung 9 SKPD dengan Tingkat Realisasi Rendah

NO	SKPD	TARGET	REALISASI	Sisa	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	3,866,655,000	3,722,215,408	144,439,592	96.3%
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1,488,702,000	1,422,921,819	65,780,181	95.6%
3	SEKRETARIAT DPRD	1,141,987,000	1,042,875,743	99,111,257	91.3%
4	SEKRETARIAT DAERAH	29,641,612,000	20,154,582,579	9,487,029,421	68.0%
5	DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN	6,769,617,000	6,698,163,331	71,453,669	98.9%
6	BAPPE D	1,617,090,000	1,593,813,378	23,276,622	98.6%
7	BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN	3,278,701,000	2,930,949,343	347,751,657	89.4%
8	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	742,941,000	660,602,066	82,338,934	88.9%
9	KANTOR SATUAN POLISI - PP	1,511,325,000	1,445,209,979	66,115,021	95.6%
	TOTAL	50,058,630,000	39,671,333,646	10,387,296,354	79.2%

Sisa lebih belanja tidak langsung didominasi oleh besarnya sisa lebih belanja tidak langsung pada Sekretariat Daerah dimana mencapai Rp. 9,4 Miliar atau dengan tingkat realisasi 68%.

Belanja Langsung

Bila ditelusuri pada komponen belanja yang tingkat realisasinya rendah, maka terungkap bahwa rendahnya tingkat realisasi didominasi oleh komponen Belanja Langsung. Seperti juga terdapat pada 9 SKPD berikut ini:

Tabel 2.3
Tingkat Realisasi Belanja Langsung 9 SKPD

NO	SKPD	TARGET	REALISASI	Sisa	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	40,770,084,000	28,314,303,124	12,455,780,876	69.4%
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4,909,153,000	3,183,985,290	1,725,167,710	64.9%
3	SEKRETARIAT DPRD	5,947,159,000	4,268,081,305	1,679,077,695	71.8%
4	SEKRETARIAT DAERAH	26,789,695,000	23,047,050,047	3,742,644,953	86.0%
5	DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN	6,497,701,000	4,672,349,950	1,825,351,050	71.9%
6	BAPPEDA	3,182,004,000	2,649,755,800	532,248,200	83.3%
7	BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN	2,514,906,000	2,210,651,227	304,254,773	87.9%
8	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	2,214,082,000	2,030,108,175	183,973,825	91.7%
9	KANTOR SATUAN POLISI - PP	901,276,000	732,427,200	168,848,800	81.3%
	TOTAL	93,726,060,000	71,108,712,118	22,617,347,882	75.9%

Sebagaimana terungkap pada Tabel 2.3 di atas, pada kurun pelaksanaan anggaran tahun 2009 Dinas PU merupakan SKPD yang paling besar menyumbang sisa lebih belanja langsung, dimana sebesar Rp. 12,4 Miliar.

Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
DINAS PEKERJAAN UMUM	44,636,739,000	32,036,518,532	12,600,220,468	72%
Belanja Tidak Langsung	3,866,655,000	3,722,215,408	144,439,592	96%
Belanja Langsung	40,770,084,000	28,314,303,124	12,455,780,876	69%
<i>Belanja Pegawai</i>	870,998,000	631,656,500	239,341,500	73%
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,370,836,000	1,251,319,475	119,516,525	91%
<i>Belanja Modal</i>	38,528,250,000	26,431,327,149	12,096,922,851	69%

Sebagian besar sisa lebih belanja anggaran Dinas PU bersumber dari rendahnya realisasi Belanja Modal. Dari anggaran belanja modal sebesar Rp. 38,5 Miliar, terealisasi sebesar Rp. 26,4 Miliar, sehingga tersisa Rp. 12 Miliar. Kondisi performa pelaksanaan anggaran demikian terutama disebabkan;

1. Pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , yaitu Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan, dari Rp. 12 miliar hanya terealisasi Rp.

TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

716,6 juta (5,97%) sehingga tersisa anggaran Rp. 11,2 Miliar. Seperti pada matriks berikut ini:

NO	BELANJA	CATATAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Kegiatan Pembangunan Gedung		
	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp. 12.000.000.000	Rp.716.606.950
	Keluaran/Output	Selisih +/-	
	Dokumen UKL-UPL Dokumen Perencanaan pasar besar Dokumen menejemen kontruksi Dokumen pembangunan pasar besar (fisik) tgl. 31 Desember 2009 Mestinya dicantumkan: Intslaasi satu area penampungan sementara pedagang.	Rp. 11.283.393.050	
	Masalah		
	Pembangunan fisik tahun 2009 belum dapat terlaksanakan karena ada retender konsultan perencanaan.		
	Solusi		
	Untuk pekerjaan fisik dimulai tahun 2010		
	Kesimpulan		
	Realisasi belanja barang dan jasa lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan terjadi proses retender khususnya pada pengadaan konsultan perencanaan. Hal ini dikarenakan pada tahap evaluasi penawaran teknis tidak ada konsultan yang memenuhi persyaratan. Dinas Pekerjaan Umum minta konsultan yang lulus itu harus berada di atas atau sama dengan <i>passinggrade</i> yakni sebesar 70 Pada tahap proses pengadaan jasa pemborongan memerlukan evaluasi yang cukup lama sampai dengan terjadinya kontrak. Keterlambatan proses melalui dari pengadaan konsultan perencanaan dan pengadaan jasa pemborongan memerlukan waktu sekitar 60 hari kalender, akibat keterlambatan ini maka dana yang seharusnya untuk fisik tidak dapat diserap.		

2. Sebagaimana dilaporkan dalam Lampiran Laporan Keuangan, maka penting untuk dipertanyakan:
 - a. Tidak sesuai yang dilaporkan pada Lampiran Laporan Keuangan. Belanja barang jasa pada kegiatan ini terealisasi optimal 91,62%. Demikian pula dengan belanja pegawai yang terealisasi 97%.

Dengan kegagalan pelaksanaan kegiatan demikian maka realisasi sebesar ini semestinya mendapatkan penjelasan.

- b. Bila pekerjaan fisik dilaporkan “ditunda” dilaksanakan pada 2010, mengapa terdapat pembelanjaan sebesar Rp. 669,7 juta?
- c. Apakah persoalan demikian tidak disebabkan oleh ketidakmampuan aparat perencana melakukan penjadualan kegiatan?
- d. Rendahnya realisasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana realisasinya hanya 83%, apakah hal ini tidak merupakan potensi inefisiensi anggaran?

Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,397,855,000	4,606,907,109	1,790,947,891	72%
Belanja Tidak Langsung	1,488,702,000	1,422,921,819	65,780,181	96%
Belanja Langsung	4,909,153,000	3,183,985,290	1,725,167,710	65%
<i>Belanja Pegawai</i>	1,020,181,000	746,071,295	274,109,705	73%
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,759,342,000	2,320,433,995	1,438,908,005	62%
<i>Belanja Modal</i>	129,630,000	117,480,000	12,150,000	91%

Seperti nampak pada table di atas, sesuai APBD Perubahan Tahun 2009, BKD Kota Madiun, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mendapatkan alokasi anggaran Rp. 4,9 Miliar. Pada akhir tahun anggaran 2009, telah terealisasi Rp. 3,1 Miliar, atau capaian kinerja anggaran 65% sehingga tersisa anggaran Rp. 1,7 Miliar.

Rendahnya realisasi belanja langsung terutama disebabkan besarnya sisa belanja pada Program/kegiatan:

1. Kegiatan seleksi penerimaan Calon PNS dari Rp. 742 juta hanya terserap Rp. 493 juta atau terealisasi 66% dan tersisa anggaran Rp. 248 juta.
2. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, dengan anggaran Rp. 560 juta hanya terserap Rp. 292 juta atau terealisasi 52%, dan tersisa anggaran Rp. 267 juta.

Oleh karena penting untuk dipertanyakan:

1. Apakah tidak terdapat perhitungan yang rasional dan akurat dari perencana anggaran program dan kegiatan di BKD? Atau
2. Apakah pada besarnya sisa belanja pada kegiatan ini dikarenakan adanya penghematan, atau akibat *mark up* dalam perencanaan anggaran.
3. Mengapa realisasi pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana realisasinya hanya 106%, apakah pelampauan target belanja ini tidak merupakan potensi inefisiensi anggaran dan melanggar ketentuan Permendagri 13/2006 Pasal 122? Dari anggaran Rp. 185,9 juta direalisasikan Rp. 197,4 juta.

Sekretariat DPRD

Sebagaimana pada table berikut ini, permasalahan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Madiun terletak pada rendahnya realisasi pada anggaran Belanja Barang/Jasa. Dari anggaran Rp. 5,9 Miliar, hanya terealisasi Rp. 4,2 Miliar dimana sebesar Rp. 1,5 Miliar tersisa dari tidak terserapnya 30% belanja barang dan jasa.

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
SEKRETARIAT DPRD	7,089,146,000	5,310,957,048	1,778,188,952	75%
Belanja Tidak Langsung	1,141,987,000	1,042,875,743	99,111,257	91%
Belanja Langsung	5,947,159,000	4,268,081,305	1,679,077,695	72%
<i>Belanja Pegawai</i>	552,050,000	423,277,500	128,772,500	77%
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,118,109,000	3,578,023,305	1,540,085,695	70%
<i>Belanja Modal</i>	277,000,000	266,780,500	10,219,500	96%

Di Sekretariat DPRD hal yang hendaknya menjadi perhatian adalah optimalisasi pendayagunaan anggaran pada:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terutama pada kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang sampai menyisakan anggaran Rp. 465 juta.
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dimana sampai akhir tahun anggaran 2009, tersisa anggaran Rp. 829 Juta. Pada program ini terutama permasalahan penyerapan anggaran adalah pada kegiatan **Rapat-rapat alat kelengkapan dewan** dan kegiatan **Reses**.

Sekretariat Daerah

Sisa anggaran pada Sekretariat Daerah menempati jumlah terbesar dengan Rp. 13,2 miliar dimana dari Rp. 56,4 miliar terserap sebesar 43,2 miliar (77%). Rupanya sisa lebih belanja ini lebih dari 50% bersumber dari tidak terealisasi Belanja Tidak Terduga. Sebesar Rp. 7,9 miliar. Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 8,2 Miliar dan terealisasi sebesar Miliar Rp. 7,4 Miliar. Dengan kata lain sebesar Rp. 874 juta tidak tersalur kepada Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
SEKRETARIAT DAERAH	56,431,307,000	43,201,632,626	13,229,674,374	77%
Belanja Tidak Langsung	29,641,612,000	20,154,582,579	9,487,029,421	68%
<i>Belanja Pegawai</i>	11,001,205,000	10,316,315,579	684,889,421	94%
<i>Belanja Hibah</i>	2,391,000,000	2,415,117,000	(24,117,000)	101%

<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	8,297,651,000	7,423,150,000	874,501,000	89%
<i>Belanja Tak Terduga</i>	7,951,756,000	0	7,951,756,000	0%
Belanja Langsung	26,789,695,000	23,047,050,047	3,742,644,953	86%
<i>Belanja Pegawai</i>	3,124,158,000	2,553,862,855	570,295,145	82%
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19,605,296,000	16,532,284,312	3,073,011,688	84%
<i>Belanja Modal</i>	4,060,241,000	3,960,902,880	99,338,120	98%

Dari tingkat realisasi dua komponen Belanja Tidak langsung di atas, bisa dicatat:

1. Terkhusus besarnya sisa anggaran dari belanja tidak terduga maka penting diingat Permendagri 32/2008 tentang petunjuk penyusunan APBD 2009, bahwa dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2008 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Bila pada realisasi anggaran tahun 2008, dianggarkan belanja tidak terduga Rp. 3,4 Miliar dan itupun tidak tergunakan sehingga menambah sisa lebih anggaran, mengapa pada tahun 2009 harus dianggarkan Rp. 7,9 Miliar.
2. Dalam kerangka kebijakan desentralisasi fiskal daerah, tentu patut diapresiasi peningkatan belanja bantuan social tahun 2009 dibanding tahun 2008. Namun realisasi Bansos yang hanya mencapai 89% tentu bisa mengindikasikan kurang optimalnya kemauan politik Pemkot Madiun dalam pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. *Oleh karena itu diperlukan penjelasan terkait faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi.*

Sementara pada Belanja Langsung, terdapat sebesar 3,7 miliar sisa belanja dimana pada komponen belanja barang dan jasa sampai terdapat sisa belanja Rp. 3 miliar akibat tingkat realisasi 84%. Hal penting yang patut dicatat adalah:

1. Sisa lebih belanja barang dan jasa dominan dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja barang/jasa untuk program-program rutin aparatur (ex adum).
2. Pada program pelayanan administrasi aparatur, dengan tingkat realisasi 79,95% dimana dari anggaran Rp. 9,4 miliar hanya terealisasi 7,5 miliar sehingga menyebabkan adanya sisa anggaran Rp. 1,9 miliar. Hal ini terutama ditengarai akibat *over estimate* atas belanja pegawai honorer dan pembayaran belanja listrik, koordinasi/konsultasi ke luar daerah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	13,267,318,000	11,370,513,281	1,896,804,719	86%
Belanja Tidak Langsung	6,769,617,000	6,698,163,331	71,453,669	99%

TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

Belanja Langsung	6,497,701,000	4,672,349,950	1,825,351,050	72%
Belanja Pegawai	714,037,000	680,969,850	33,067,150	95%
Belanja Barang dan Jasa	2,510,341,000	2,371,480,600	138,860,400	94%
Belanja Modal	3,273,323,000	1,619,899,500	1,653,423,500	49%

Sebagaimana pada Tabel di atas, Pada tahun anggaran 2009 untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mendapatkan alokasi anggaran Rp. 6,4 Miliar dan terserap sebesar Rp. 4,6 Miliar atau dengan tingkat realisasi 72%, sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. 1,6 miliar

Problem pelaksanaan anggaran di Dinas ini terutama pada tidak terlaksananya kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran, seperti dilaporkan dalam lampiran laporan keuangan berikut ini:

NO	BELANJA		
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN		
	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp. 1.612.000.000	Rp. -
	Keluaran/Output		
	Pengadaan 1 unit mobil PMK		
	Masalah		
	Proses tender dinyatakan GAGAL karena tidak adanya penawaran yang memenuhi syarat maupun spesifikasi teknis yang diharapkan.		
	Solusi		
	Pengadaan mobil PMK direncanakan pada tahun 2010		
	Kesimpulan		
	Mobil PMK yang representative dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dari bahaya kebakaran.		

Permasalahan yang dilaporkan adalah adanya kegagalan dalam proses tender. Namun melihat adanya tingkat realisasi anggaran 0% di semua bagian anggaran kegiatan (belanja pegawai, barang/jasa dan modal) maka proses pelaksanaan kegiatan ini tentu patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan dari 0% realisasi anggaran maka ada kesan bahwa sejak awal tahun tidak terdapat aktifitas apapun dari pelaksana kegiatan, atau sejak awal sudah ada “kegagalan yang direncanakan”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kondisi pengelolaan keuangan Kota Madiun tahun 2009 menunjukkan pola persoalan rendahnya realisasi anggaran pada komponen belanja langsung dimana diindikasikan terkait dengan:

- a. Belanja belanja barang dan jasa realisasinya relatif rendah (terutama di program/kegiatan ex administrasi umum) cenderung disebabkan karena pola perencanaan anggarannya kurang memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran. Hal ini banyak menyebabkan berlebihnya anggaran yang dialokasikan, dan mendorong pelaksana kegiatan terdorong untuk sekedar menghabiskan anggaran.
- b. Sementara rendahnya realisasi belanja modal tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh lemahnya kapasitas staf pelaksana kegiatan di dalam melaksanakan proses tender yang memerlukan waktu cukup panjang dalam implementasinya. Hal ini diperparah dengan tidak memadainya pola penjadwalan pengadaan kontruksi sehingga banyak proyek yang terlaksana secara tidak optimal (sesuai target) ataupun tidak terlaksana sama sekali.

Bila ditinjau berdasarkan 6 Fungsi Anggaran, maka analisis atas kinerja anggaran APBD Kota Madiun 2009 terutama pada tingkatan SKPD bisa diungkapkan:

- (1) Fungsi otorisasi: APBD 2009 belum secara optimal menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tahun 2009
- (2) Fungsi perencanaan: Kurang cermatnya memprediksi alokasi dan penggunaan anggaran pada saat perencanaan, menyebabkan APBD 2009 belum efektif dijadikan pedoman bagi manajemen program dan kegiatan pada tahun 2009.
- (3) Fungsi pengawasan: rendahnya kinerja realisasi APBD 2009 bisa mengindikasikan adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi: besarnya sisa lebih anggaran (belanja) berpotensi mengakibatkan besarnya “dana nganggur” sehingga APBD 2009 tidak banyak berdampak peningkatan pelayanan publik, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan atau peningkatan perekonomian daerah
- (5) Fungsi distribusi: Adanya alokasi yang besar pada belanja rutin aparatur tetapi pada akhirnya terdapat realisasi yang rendah mengakibatkan inefektifitas anggaran dimana mengurangi peluang belanja yang beroreintasi pelayanan publik, bisa mengindikasikan lemahnya penegakkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan APBD 2009.
- (6) Fungsi stabilisasi: Sisa lebih belanja sebesar Rp. 41,2 miliar dimana pada akhirnya terdapat SiLPA Rp. 85,4 Miliar akan mengurangi derajat kapasitas APBD 2009 dalam memelihara stabilitas fundamental perekonomian daerah.

Rekomendasi:

- (1) Hasil pembahasan LPJ APBD 2009 ini hendaknya menjadi bahan evaluasi kinerja setiap SKPD dalam pengelolaan anggaran bersama Kepala Daerah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja pelaksana kebijakan anggaran.
- (2) DPRD agar mampu meningkatkan derajat pengawasan pengelolaan keuangan daerah sehingga dicapai optimalisasi dari fungsi-fungsi APBD.
- (3) Mendorong berfungsinya pengendalian pengelolaan keuangan internal Pemkot Madiun dengan mengoptimalkan kinerja Inspektorat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Brata, A. G. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Helfert, E. 2000. Teknikanalisa Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Gaspersz, V. dan Foenay, E. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryati, S. 2006. Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Indriantoro, N & Bambang S. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Ibrahim, M. J. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara Prize.
- Munawir, S. 1995. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Samiadji, B. T. 2007. Metoda Menilai Daerah tertinggal [On line]
<http://www.mailarchive.com/referensi@yahoogroups.com/msg01026.html>

TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

- Setiaji, W. & Adi, P. H. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Widjaja. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Wulandari, A. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No. 2 November Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.